

IMPLEMENTASI *TSUNAMI READY* DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Adi Fitriadi

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh
Email : adifitriadi@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi diketahui bahwa implementasi Tsunami Ready di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini terlihat dari belum optimalnya pemerintah desa mempersiapkan rencana dan sistem evakuasi untuk menghadapi bencana tsunami, seperti pemerintah desa kurang menyampaikan informasi secara jelas dan terperinci mengenai peta area untuk melakukan evakuasi, kurangnya pemerintah desa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten pangandaran mengenai kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana tsunami, seperti kurang mensosialisasikan mitigasi bencana tsunami, kurangnya pemerintah desa melakukan pendidikan dan kesiapsiagaan untuk menghadap bencana tsunami secara rutin terhadap masyarakat desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Tsunami Ready di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Tsunami Ready di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Agustino (2016:137), tentang variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang aktif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, kurangnya petugas pelaksana yang mumpuni untuk mengimplementasikan program Tsunami Ready di desa, hal ini dikarenakan masih terbentur dengan keterampilan dan pemahaman dalam penanganan bencana, kurangnya keaktifan dari beberapa aparatur pemerintah desa untuk memahami mengenai program Tsunami Ready sebagai mitigasi bencana di desa, kurangnya kesadaran dari beberapa aparatur perangkat desa tentang pentingnya untuk mengimplementasikan program Tsunami Ready sebagai mitigasi bencana di desa.

Kata Kunci : *Implementasi, Tsunami Ready*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan di mana sebagian wilayahnya adalah perairan, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memilih tinggal di wilayah pesisir. Melihat Sejarah pertumbuhan kota dan permukiman di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menempati lokasi di pesisir ataupun di pinggir sungai, karena tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi manusia.

Wilayah pesisir juga memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan juga pariwisata. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahayanya tinggal di pesisir pantai. Tinggal di pesisir pantai memiliki potensi bahaya terkena bencana alam, salah satunya adalah bencana tsunami.

Tsunami dapat disebabkan oleh longsor di bawah laut, erupsi letusan gunung berapi, gempa bumi berskala besar, atau gangguan besar lainnya di dasar laut sehingga menyebabkan adanya gelombang raksasa yang merambat sangat cepat dan melanda ke daratan. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik yang muncul karena aktivitas pergerakan lempeng tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya.

Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik, berbagai wilayah pesisir di Indonesia berpotensi mengalami bencana tsunami. Tercatat beberapa sejarah tsunami yang pernah melanda Indonesia yaitu tsunami di Laut Banda pada tahun 1674 yang mengakibatkan

lebih dari 2000 korban meninggal dunia. Erupsi Gunung Krakatau yang akhirnya menyebabkan tsunami di sekitar Selat Sunda sampai Jawa dan Sumatera pada tahun 1883 dan menyebabkan lebih dari 30.000 orang meninggal dunia. Pada tahun 1992, terjadi tsunami di Flores yang menewaskan lebih dari 2000 orang. Lalu tsunami terbesar yang menyebabkan sekitar 250.000 orang meninggal dunia yaitu tsunami di Aceh pada tahun 2004. Di Pangandaran, pernah terjadi tsunami pada tahun 2006 dan menewaskan kurang lebih 670 orang, 65 orang hilang dan lebih dari 9.000 orang luka-luka.

Kemudian pada tahun 2018 terjadi tsunami di Palu pada bulan September yang menewaskan lebih dari 3000 orang. Pada bulan Desember di Selat Sunda terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau yang menimbulkan tsunami sehingga menewaskan lebih dari 400 orang, dan lebih dari 7.000 orang luka-luka. Selain kerugian karena banyaknya korban jiwa, terdapat juga kerugian karena terguncangnya psikologis para korban yang selamat dari bencana tsunami.

Tidak hanya itu, kerugian materi yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah juga menjadi salah satu yang paling merugikan, yaitu kehilangan tempat tinggal, infrastruktur, sarana publik, dan yang lainnya. Jika daerah yang terjadi tsunami merupakan daerah pariwisata pantai, maka akan lebih banyak kerugian yang terjadi terutama dalam hal materi, karena jumlah wisatawan yang berkunjung akan menurun dan merugikan industri pariwisata.

Karena kerugian dan korban yang begitu banyak akibat bencana tsunami, maka hal ini menjadi salah

satu permasalahan besar dan tugas bagi setiap negara untuk meminimalisir dampak kerusakan dan jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut.

Di samping itu, pemikiran penanggulangan bencana juga harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan membentuk lembaga sebagai pengarah dan juga pelaksana penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, karena Indonesia merupakan negara yang sangat luas, jumlah penduduk yang tidak merata di setiap pulau dan daerahnya, juga fasilitas pendidikan dan fasilitas publik yang berbeda di setiap wilayah, menyebabkan pengetahuan dan kesiapan siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam menjadi tidak merata pada setiap penjuru daerah di Indonesia.

Kurangnya pengetahuan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti dalam bidang pariwisata. Daerah wisata pantai yang terkenal di Indonesia salah satunya adalah pantai selatan Jawa Barat. Menurut BNPB, pantai selatan Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar mengalami tsunami

Desa Pangandaran merupakan kawasan yang terletak di pesisir pantai dan merupakan kawasan rawan bencana Tsunami, kejadian tsunami di Desa Pangandaran pernah terjadi pada

tahun 2006 yang mengakibatkan korban jiwa dan materiil, banyaknya korban dan kerugian materiil disebabkan karena selain Desa Pangandaran merupakan kawasan rawan bencana Tsunami, Kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana tsunami masih kurang, dan Peralatan mitigasi bencana yang tersedia sangat terbatas sehingga menimbulkan korban jiwa dan materiil yang besar, sehingga dibutuhkan pencegahan dan pemahaman mitigasi bencana.

Tsunami di pantai selatan Jawa Barat tepatnya di Pantai Pangandaran pada tahun 2006 menewaskan 670 orang, 65 orang hilang, dan lebih dari 9000 orang luka-luka. Lokasi Pantai Pangandaran yaitu tepatnya di Desa Pangandaran, adalah lokasi yang berada di dekat zona subduksi, juga merupakan dataran yang rendah atau hampir rata dengan lautan, sehingga menjadikan Desa Pangandaran berpotensi mengalami kejadian bencana tsunami lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, baik sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan sesudah terjadi bencana, serangkaian upaya itu disebut mitigasi bencana. Karena pentingnya hal itu, penelitian ini akan mengkaji tentang kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana tsunami di Desa Pangandaran, terutama masalah pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami, dan peran masyarakat serta tugas pemerintah dalam hal mitigasi bencana tsunami, dalam hal ini Program *Tsunami Ready* dilaksanakan agar dapat meminimalisir potensi

kerugian akibat tsunami di Desa Pangandaran

Tsunami Ready merupakan program mitigasi bencana yang merupakan pencegahan pengurangan resiko bencana pada saat terjadi bencana, sehingga dengan adanya program tersebut masyarakat diharapkan siap dan mampu mengantisipasi untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tsunami sehingga mampu mengurangi resiko bencana.

Program *Tsunami Ready* merupakan program pendampingan untuk mewujudkan desa siap tsunami berbasis indikator IOC-UNESCO, yang diuji dengan BMKG, Pusat Riset Geoteknologi LIPI-BRIN, Pemda Kabupaten Pangandaran, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, BPBD Kabupaten Pangandaran, BPBD Provinsi Jawa Barat dan U-INSPIRE.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam suatu proses kebijakan, aspek pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting bagi keseluruhan proses kebijakan.

Secara epistemologis pengertian implementasi menurut kamus Webster (Wahab, 2004:113) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan), *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Agustino (2017:128) menyatakan bahwa :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Hakikat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Dalam membuat suatu program atau kebijaksanaan mungkin cukup sulit namun akan lebih sulit lagi adalah mengimplementasikan program atau kebijaksanaan yang telah dibuat tersebut. Program atau kebijaksanaan bukan hanya untuk di buat saja namun harus diimplementasikan sehingga rencana-rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan dan harapan.

Agustino (2017:128) mengemukakan pendapat bahwa:

Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dengan demikian bahwa pelaksanaan kebijakan berbentuk

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting untuk mencaai tujuan atau sasaran.

Dari uraian di atas dapat benang merahnya, bahwa implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Bencana tsunami biasanya berhubungan dengan gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan proses terjadinya getaran tanah yang merupakan akibat dari sebuah gelombang elastis yang menjalar melalui massa bumi. Besarnya dampak yang diakibatkan dari bencana tsunami karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tsunami, maka diperlukan penjelasan yang baik kepada masyarakat akan bahaya tsunami dan dampak yang ditimbulkan akibat tsunami. Hal inilah yang mendasari para peneliti untuk mengembangkan penelitian tentang perambatan gelombang tsunami dengan membuat penjelasan dan memberikan gambaran dalam bentuk visualisasi sehingga mudah dipelajari dan dipahami dan diharapkan dalam membantu memahami bencana tsunami dan akibat yang ditimbulkan sehingga bisa mengurangi jumlah korban jiwa dan harta benda apabila terjadi bencana tsunami.

Menurut Sugito (2008: 147) Tsunami adalah :

Perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa

disebabkan oleh gempa bumi yangberpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut.

Sedangkan menurut Triatmodjo (2008:100) tsunami adalah : “Gelombang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di laut”.

Adapun menurut Setyonegoro (2009: 84) menyatakan :

Tsunami biasanya berhubungan dengan gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan proses terjadinya getaran tanah yang merupakan akibat dari sebuah gelombang elastis yang menjalar melalui massa bumi. Gelombang ini dapat bersumber dari ledakan besar gunung berapi atau gempa vulkanik, tanah longsor, atau pergeseran lempeng bumi atau gempa tektonik

Gelombang tsunami yang dihasilkan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang menakjubkan sekitar 800 km/jam. Sama seperti gelombang lainnya, ketika gelombang tsunami memasuki air dangkal, maka kecepatannya akan menurun tetapi ketinggiannya bertambah tinggi karena terjadi penumpukan massa air. Ramya (2011:11).

Menurut Triatmodjo (2008:100) tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di laut tergantung pada beberapa faktor sebagai berikut ini.

- a. Kedalaman pusat gempa (episentrum) dibawah dasar laut h (km).
- b. Kekuatan gempa M yang dinyatakan dalam skala Richter.

c. Kedalaman air di atas episentrum d (m).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa kesiapsiagaan adalah : “Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna”.

Sedangkan menurut Triutomo (2011: 48) kesiapsiagaan adalah : “Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah secara berhasil-guna dan berdaya-guna”.

Adapun menurut Dodon (2013: 129) kesiapsiagaan merupakan : “Kegiatan yang sifatnya perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang”.

Masih menurut Dodon (2013: 129) tujuan kesiapsiagaan yaitu : “Untuk meminimalkan efek samping bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisiensi untuk tindakan tanggap darurat dan bantuan saat bencana”.

Dari uraian di atas kesiapsiagaan bencana merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga terakit, masyarakat, dan perorangan dalam proses manajemen bencana untuk mengantisipasi dampak dari bencana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Sugiyono (2017 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah

sebagai berikut : “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu “Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif”.

Dengan demikian pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menguraikannya secara deskriptif dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu mengenai Implementasi Tsunami Ready di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Adanya sosialisasi mengenai implementasi program *Tsunami Ready* terhadap masyarakat di desa

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, untuk melakukan sosialisasi mengenai program *Tsunami Ready* di desa pemerintah desa sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM)

untuk mensosialisasikan program *Tsunami Ready* di desa agar masyarakat tidak lengah dan selalu siapsiaga dalam menghadapi bencana tsunami yang tidak dapat diprediksi, seperti mensosialisasikan peta wilayah jalu evakuasi apabila terjadi bencana tsunami.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa anggota Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) selalu mengingatkan terhadap pemerintah desa agar tidak lengah terhadap situasi yang aman, karena bencana tsunami tidak dapat diprediksi, dan senantiasa untuk selalu fokus untuk mensosialisasikan mengenai program *Tsunami Ready* di desa karena hal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di desa agar selalu siapsiaga dalam menghadapi bencana tsunami, seperti mensosialisasikan dengan cara memberikan arahan secara langsung ataupun dengan melalui alat peraga seperti papan informasi dan papan petunjuk untuk mitigasi bencana.

b. Adanya koordinasi yang dilakukan perangkat desa mengenai program *Tsunami Ready* di desa;

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa pemerintah desa selalu melakukan koordinasi, baik itu dengan BNPB sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam bidang penanganan bencana di daerah Pangandaran maupun dengan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa Pangandaran.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa dalam pelaksanaan dilapangan koordinasi diantara pemerintah desa dengan BNPB sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan Forum Kesiapsiagaan Dini

Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa Pangandaran masih kurang optimal, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dari pemerintah desa sehingga kurang mampu untuk melakuakn koordinasi dalam pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa sehingga kurang diketahui sejauhmana pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa Pangandaran.

c. Adanya peran aktif semua pihak mengenai pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa, pemerintah desa sudah berusaha untuk memberikan pengertian dan mengajak semua lapisan masyarakat desa untuk turut serta secara aktif dalam pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa sebagai mitigasi bencana, karena hal ini memang sangat penting sehingga perlu adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk pro aktif dalam program *Tsunami Ready* di desa sebagai mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa dalam pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa sebagai mitigasi bencana, masih kurang diikuti oleh semua lapisan masyarakat di desa, hal ini dikarenakan kekurang aktifan dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi dan memberikan pengertian serta wawasan mengenai mitigasi bencana khususnya di desa Pangandara sehingga kurang mampu meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa sebagai mitigasi bencana di desa.

2. Sumber daya

a. Adanya sumber daya manusia yang memadai dalam

mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa untuk ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, memang sudah tersedia walaupun memang masih adanya keterbatasan kalau hanya mengandalkan dari aparat pemerintah desa tetapi harus di bantu oleh Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa yang memang sudah bergerak dan membantu pemerintah desa dalam berbagai pelaksanaan program penanganan bencana di desa Pangandaran.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa untuk pelaksana di lapangan dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa kalau hanya mengandalkan dari aparat pemerintah desa memang masih kurang mumpuni karena memang terbentur dengan keterampilan dan pemahaman dalam penanganan bencana, dan selama ini dalam pelaksanaan dilapangan sudah dibantu oleh Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa yang memang sudah bergerak dan membantu pemerintah desa dalam berbagai pelaksanaan program penanganan bencana di desa Pangandaran.

b. Adanya mekanisme yang jelas bagi petugas pelaksana dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa mekanisme yang jelas bagi petugas pelaksana dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, sudah ada dan

sudah dilaksanakan dari mulai perencanaan program secara matang, sosialisasi, pemetaan jalur evakuasi dan hal ini dapat mempermudah terhadap pelaksana dilapangan untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa mekanisme untuk untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa sudah ada dan sudah direkomendasikan oleh Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa yang memang sudah bergerak dan membantu pemerintah desa dalam berbagai pelaksanaan program penanganan bencana di desa Pangandaran dan menyusun mekanisme untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa.

c. Adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai bagi pelaksana dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai bagi pelaksana dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, sudah tersedia walaupun memang sebagian besar memang di sediakan oleh pemerintah daerah melalui BNPB dengan dibantu oleh Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa untuk penyediaan dari desa sendiri baru sebatas penyediaan lahan untuk evakuasi seperti kawasan cagar alam, pasar wisata dan yang lainnya.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa dukungan sarana dan fasilitas pendukung untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa memang masih kurang karena memang kalau mengandalkan dari pemerintah desa masih kurang mumpuni hal ini dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk menyediakan sarana dan fasilitas pendukung yang mumpuni untuk menunjang dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa.

3. Disposisi

a. Adanya kesesuaian dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai kesesuaian dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa bahwa untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa perlu di dukung dengan kesesuaian petugas pelaksana yang memahami mengenai mitigasi bencana sehingga perlu adanya kesesuaian dalam menempatkan petugas pelaksana agar sesuai dengan keterampilan dan pengetahuannya.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa yang terlihat selama ini kesulitan untuk memilih aparatur perangkat desa untuk menjadi pelaksana di lapangan untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa, karena memang masih kurangnya pemahaman dan keahlian dalam mitigasi bencana.

b. Adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai pembagian kerja sesuai dengan kemampuan petugas dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, bahwa pembagian kerja memang sudah diatur berdasarkan tupoksi kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan dari aparatur desa sehingga dapat mempermudah untuk melakukan pembagian kerja dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa selama ini yang terlihat dalam mengimplementasikan dilapangan masih kurangnya pendampingan terhadap aparatur perangkat desa sehingga kurang menguasai untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa, dan hal ini perlu adanya perhatian dari pemerintah desa.

c. Adanya motivasi bagi pelaksana dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai motivasi bagi pelaksana dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, bahwa pemerintah desa sudah berusaha untuk memberikan dorongan dan meningkatkan kesadaran dari aparatur perangkat desa agar memiliki motivasi yang tinggi untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa pemerintah desa kurang mampu meningkatkan kesadaran dari sebagian aparatur perangkat desa sehingga terkadang masih ada yang kurang memiliki motivasi yang tinggi untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi

bencana di desa, padahal hal ini sangat penting bagi desa yang termasuk dalam rawan bencana.

4. Struktur birokrasi

a. Adanya SOP sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai SOP sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, bahwa pemerintah desa sudah menyusun serta memiliki SOP Rencana Operasi Kebencanaan dan dalam pelaksanaannya perlu adanya arahan tentang SOP untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa karena memang dengan adanya SOP dapat meminimalisir resiko akibat dari terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa untuk SOP memang selama ini pemerintah desa sudah memiliki SOP yang jelas dan terperinci untuk penanganan bencana, namun memang harus dipahami dan dimenherti sehingga dapat mempermudah dan dapat meminimalisir resiko akibat dari kejadian bencana tsunami.

b. Adanya standar kerja bagi pelaksana sebagai dasar dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai standar kerja bagi pelaksana sebagai dasar dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, bahwa standar kerja memang sudah tinggal bagaimana cara aparat perangkat desa dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa sehingga

tidak ada kesalahpahaman dan dapat mempermudah dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa Pemerintah desa kurang pro aktif untuk menjelaskan standar kerja terhadap aparat perangkat desa ataupun terhadap Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa sehingga masih adanya kesalah pahaman dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa.

c. Adanya pembagian tanggung jawab kepada masing-masing petugas pelaksana untuk memudahkan mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian tanggung jawab kepada masing-masing petugas pelaksana untuk memudahkan mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, bahwa sudah adanya pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi kerja di antara aparat perangkat desa dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa agar tidak adanya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa komunikasi yang kurang baik di antara aparat perangkat desa dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa sehingga kesulitan untuk membagi tanggung jawab dalam mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi

bencana di desa dan hal ini akan menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai Implementasi *Tsunami Ready* di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, masih kurang sesuai dengan variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Agustino (2016:137), hal ini terlihat dari pemerintah desa kurang aktif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa Pangandaran, masih kurangnya petugas pelaksana yang mumpuni untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* di desa, hal ini dikarenakan masih terbentur dengan keterampilan dan pemahaman dalam penanganan bencana, kurangnya keaktifan dari beberapa aparatur pemerintah desa untuk memahami mengenai program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa dan hal ini akan mempersulit untuk mengimplementasikannya dilapangan, kurangnya kesadaran dari beberapa aparatur perangkat desa tentang pentingnya untuk mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu pemerintah desa berusaha meningkatkan komunikasi yang baik dengan BNPB sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat

(FKDM) sebagai organisasi masyarakat yang membantu dalam menangani bencana di desa agar dapat mengkoordinasikan pelaksanaan program *Tsunami Ready* di desa sehingga dapat bersinergi dan dapat dilaksanakan secara optimal, pemerintah desa sudah memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur perangkat desa mengenai mitigasi bencana di desa agar dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam pelaksanaan dilapangan, pemerintah desa sudah memberikan arahan terhadap aparatur pemerintah desa agar berusaha untuk memahami program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa sehingga dapat mempermudah untuk menempatkan sebagai petugas pelaksana di lapangan yang sesuai dengan keahlian dan wawasannya, memberikan arahan dan pengertian mengenai pentingnya mengimplementasikan program *Tsunami Ready* sebagai mitigasi bencana di desa sehingga dapat meningkatkan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Bandung.
- Bambang Triatmodjo, 2008. *Hidrologi Terapan*. Yogyakarta : Beta Offset.
- Dodon. 2013. "Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat di Permukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir" dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No.2,

- Agustus 2013, Hal. 125-140.
Bandung: Institut Teknologi
Bandung.
- Moleong, Lexy.2014. *Metode
Penelitian Kualitatif , Edisi
Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.,
Bandung.
- Ramya, V., Palaniappan, B. 2011. *An
Automated Tsunami Alert
System. International journal of
embedded system applications
(ijesa), 1(2), 177- 185. Doi :
10.5121/IJESA.2011.1206*
- Setyonegoro. 2009. *Teori Dasar dan
Panduan Menjalankan
Pemodelan. Tsunami L-2008,*
BMKG., Jakarta
- Sugito, ST. MT. 2008. *Tsunami*. Jurnal.
Bandung. Universitas
Pendidikan Indonesia
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D*. Bandung : Alfabeta., CV.
- Triutomo, S. et al. 2011. *Panduan
Perencanaan Kontinjensi
Menghadapi Bencana Edisi
Kedua*. Jakarta: Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis
Kebijaksanaan: Dari
Formulasi Ke. Implementasi
Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:
Bumi Aksara
- b. Sumber Perundang-Undangan**
- Undang Undang Republik Indonesia
No. 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana